

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SECARA BERSAMA-SAMA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs.)



OLEH:

MOAMMAR ARAFAT SAHIBO

B111 11 156

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

**PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs.)

Oleh :

MOAMMAR ARAFAT SAHIBO

B111 11 156

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana

Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)

Disusun dan diajukan oleh

MOAMMAR ARAFAT SAHIBO

B111 11 156

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 4 Maret 2015
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua,



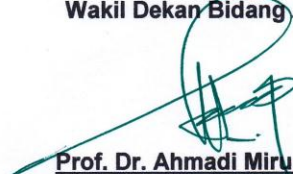
Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H., M.Si.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris,



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19660827199203

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Di terangkan bahwa usulan ujian Skripsi mahasiswa :

Nama : Moammar Arafat Sahibo
No. Pokok : B 111 11 156
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penipuan yang
dilakukan oleh Anak secara bersama-sama.
(Studi Kasus No. No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 6 Februari 2015

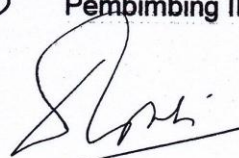
Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., Msi
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827199203

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MOAMMAR ARAFAT SAHIBO**
No. Pokok : B111 11 156
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penipuan yang
Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama
(Studi Kasus Putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2015

an. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIR 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Moammar Arafat Sahibo (B111 11 156). ***Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama. (Studi Kasus Putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs) di bawah bimbingan H.M Said Karim dan Dara Indrawati.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam putusan nomor 164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. Sudah sejalan dengan tujuan peradilan anak serta putusan dalam penjatuhan pidana terhadap anak tetap terpidana tanpa bertentangan dengan UU Perlindungan Anak berdasarkan dasar hukum hakim.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros kelas 1B berupa wawancara secara langsung dengan hakim guna meminta pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang hakim dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. Adalah riwayat hidup pelaku kesalahan dalam bentuk pencurian secara bersama-sama dan melakukan penipuan, maka hakim menetapkan lamanya terdakwa di Rumah Tahanan Negara dengan penjara selama 2 (dua) bulan. Dengan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menimbang/mengadili, dan di dalam peradilan anak, dimana peradilan anak diselenggarakan dengan di *Split* kan oleh anak dan ayahnya yang keduanya sebagai pelaku.

Putusan hakim dalam kasus tersebut, akan memberikan pengaruh kepada ayah dan anaknya dalam hal ini anak yang berperan penting untuk generasi kedepannya, guna hakim memberikan masa kurungan tersebut agar anak sebagai pelaku mendapat efek jera di karena kan sebelumnya anak tersebut sudah pernah melakukan tindak kriminal dan dalam hal ini hakim memvonis anak sebagai pelaku telah sesuai dengan dasar pemikiran hakim yang di miliki pada saat persidangan berlangsung.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis panjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW, sebagai penyelamat manusia yang telah memberikan ilmu kepada Makhluk-Nya, serta atas rahmat dan keridahan-Nya penulisan Skripsi dengan judul *“Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)*, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak dihadapkan dengan berbagai kendala, namun atas bantuan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua rang ua tercinta, Ayahanda **Hj. Iwan Sahibo, S.E** dan Ibunda **Dra. Hj.Hajerah** yang tak henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang, do’a, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil yang takkan pernah ternilai harganya. Saudari-saudaraku, **Dewi Kartini Sahibo, S.H.** dan **Izha Mahendra Sahibo**, juga keluarga besar penulis, Terima Kasih atas perhatian dan motivasinya selama penulis menempuh pendidikan dibangku Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.** dan Ibu **Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan pembimbing II atas kebaikan, pengertian dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis dalam memberikan bimbingan, arahan pemikiran dan saran hingga penulisan skripsi ini selesai.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa Terima Kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwiaries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Selaku Pembantu Dekan I Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. dan Ibu Hj. Haeranah, S.H.,M.H. Selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberi masukan, saran dan kritik terhadap skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas arahan dan dorongan moral selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum. Pegawai Administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu dalam urusan administrasi dan mendukung penulis selama masa pendidikan.
6. Teman-Teman seangkatan, Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nur Nasriadi Jufry, Dwi Randi Sulistiono, Nuria Mentari, Anita Musliha, Rafita Sari, Ilham Prawira, Muh. Irfan Umar, Muh. Faisal Tanjung, Ryan Kahfi Boer dan Putri Melinda dan junior-juniorku tercinta yang telah memberikan motivasinya.
7. Teman-Teman Komunitas Softball RedJacket Makassar yang telah memberikan Motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kakanda yang turut serta membantu dalam penyelesaian penelitian Muhammad Fitriadi, S.H.,M.H.

Dalam penulisan dan penyusunan hasil penelitian ini penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik manusia sehingga penulis memohon maaf sebesar-sebesarnya atas kekurangan dalam penelitian ini.

Demikian penulis harapkan agar hasil penelitian ini membawa manfaat bagi pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Acara Pidana.

Makassar, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Putusan Hakim	
1. Pengertian	6
2. Asas-asas	6
3. Kekuatan Putusan Hakim	7
4. Muatan Putusan	8
5. Macam-macam Putusan pengadilan	8
B. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan	8
2. Pengertian Hukum	10
3. Pengertian Perlindungan Hukum	15

C. Penipuan.....	19
D. Penyertaan.....	39
E. Anak.....	49
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	
1. Populasi.....	57
2. Sampel	57
B. Jenis Dan Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Analisis Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 164/Pid. Sus/2013/ PN. Mrs.....	60
B. Hambatan Dalam Penjatuhan Pidana.....	61
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut¹.

Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Anak sebagai *social capital* yang artinya anak tersebut sebagai modal generasi penerus bagi negara yang memiliki *urgensi* tinggi, yang

¹ Abdussalam, 2004, *Hukum Perlindungan Anak*, (PTIK Jakarta) Hal 1-2

bernilai strategis yang mempunyai kewajiban mulia dan bertanggung jawab yang berat serta mempunyai tujuan Nasional Negara Republik Indonesia. Sebagai penerus cita-cita bangsa, anak memiliki masa depan untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian bangsa yang luhur, karena semua pihak, keluarga, masyarakat atau berbagai instansi juga ikut berpartisipasi menaruh perhatian terhadap anak. Sehingga tanggung jawab yang diharapkan dari anak di kemudian hari, sebagai warga negara sadar akan hak dan kewajibannya di dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam diri anak telah di tanamkan atau diletakkan suatu dasar-dasarnya untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang sebelumnya, guna mewujudkan bekal terhadap dan tujuan-tujuan pembentukan diri agar dapat memperoleh nilai-nilai yang berguna dan bermanfaat untuk suatu di dalam masyarakat dan demi terwujudnya suatu kesejahteraan terhadap anak².

Oleh karena itu demi terwujudnya suatu harapan generasi terdahulu serta sebagai harapan bangsa dan negara maka segala bentuk perlindungan harus yang baik dan wajar terhadap anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat yang berbakti terhadap orang tua, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2 *Ibid*, hal 3

serta memiliki kemampuan untuk meneruskan cita-cita luhur berdasarkan pancasila³.

Hal ini termuat dalam undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Seperti kasus tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Penipuan” yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada bulan September tahun 2013 lalu. Pengadilan Negeri Maros pada sidang pembacaan vonis, Hakim menjatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Mengingat dan memperhatikan pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan lain bersangkutan⁴.

Di Indonesia, tidak semua anak menikmati hak-haknya sebagai anak. Apabila kita lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka anak-anak seharusnya dilindungi dan berhak menjalani masa kanak-kanaknya.

Penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “***Putusan Hakim pada Tindak Pidana***

³ *Ibid*, hal 13

⁴ *Ibid*, hal 14

Penipuan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama (Studi Kasus No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. tentang Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama ?
2. Apakah ada hambatan dalam penjatuhan pidana hukum hakim terhadap sanksi pidana dalam putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. tentang Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui adanya hambatan dalam penjatuhan pidana hukum hakim terhadap sanksi pidana dalam putusan No.164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan anak
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian

Putusan hakim atau ketetapan hakim adalah hal-hal atau Ketetapan/ Asas/ Macam-macam yang berkaitan dengan Putusan. Putusan Hakim Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang dicapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara⁵.

2. Asas-asas

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal sebagai berikut (pasal 178 HIR, 189 RBg, dan UU nomor 4 tahun 2004):

- a. Memuat alasan yang jelas dan rinci, menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, menurut ketentuan ini, putusan yang di jatuhkan pengadilan harus secara total dan

⁵ http://www.slideshare.net/ntii_meiiian/putusan-hakim-atau-ketetapan-hakim, di agyrkses pada 25 Oktober 2014

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan.

- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.
- d. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum, menurut pasal 20 UU nomor 4 tahun 2004 semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum⁶.

3. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan Putusan Hakim, ada tiga macam kekuatan putusan hakim yaitu:

- a. Kekuatan mengikat Suatu keputusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzer, banding atau kasasi berarti putusan telah mempunyai hukum tetap dan mengikat.
- b. Kekuatan pembuktian putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk otentik.
- c. Kekuatan eksekutorial yang dimaksudkan menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak dan hukumannya. Kekuatan

⁶ pasal 20 UU nomor 4 tahun 2004

eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa-apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

4. Muatan Putusan

- a. Kepala putusan (irah-rah/ judul/ rumusan)
- b. Identitas para pihak
- c. Pertimbangan
- b. Amar putusan
- c. Biaya perkara
- d. Musyawarah majelis hakim dalam pemutus perkara.
- e. Pihak yang hadir disidang waktu diucapkan putusan
- f. Tanda tangan majelis hakim dan panitra.

5. Macam-macam Putusan Pengadilan

- a. Putusan akhir Adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak / belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.
- b. Putusan sela Adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker⁷. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
- c. memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- d. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- e. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- f. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- g. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- h. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan,

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991, Jakarta.

teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan⁸.

2. Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK'MUN yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan

⁸ Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002

pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum Dalam kamus Oxford disebutkan :

“All the rules established by authority or custom for regulating the behavior of members of a community or country”. artinya “Semua peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kustom (adat atau kebiasaan) untuk mengatur perilaku anggota komunitas atau negara”

Hans Kelsen berpendapat “Hukum adalah sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah system norma”. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Menurut Utrecht “Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Selain itu Austin berpendapat “Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan

tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya⁹.

CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, (1997: 11) menjelaskan beberapa sarjana hukum di Indonesia mendefinisikan hukum sebagai berikut:

1) S.M Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulun manusia.

2) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku dalam kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

3) Soetandyo Wigjosoebroto

Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep : hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang

⁹ Ahmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume I, Kencana, Jakarta. Hal 122

berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan yang ketiga, hukum dikonsepsikan sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat.

4) Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

5) Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Melihat dari berbagai pengertian hukum dari berbagai para sarjana tersebut, maka hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat.

- b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c) Peraturan itu bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Sebuah peraturan akan layak untuk disebut sebagai hukum apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Adanya perintah / larangan
- Perintah/larangan itu harus ditaati oleh setiap orang
- Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu¹⁰:

- a) Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- b) Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk

¹⁰ *Ibid* 123

taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.

- c) Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- d) Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk social atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban

yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain¹¹.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

11 *Ibid* 144

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsataat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting Negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

- a. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif.

Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu¹² :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

C. Penipuan

a. Pengertian

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan

¹² <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>

orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana¹³.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

13 S. Ananda, 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

b. Unsur-unsur

Penipuan memiliki Unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Pasal – pasal penipuan antara lain¹⁴ :

14 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 378

i. Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
- Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

ii. Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

2) Pasal 379

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Memakai nama palsu atau keadaan palsu.

- Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Harga barang, utang atau piutang tidak lebih dari Rp. 25,-

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

3) Pasal 379a

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Membeli barang-barang untuk diri sendiri atau orang lain.
- Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang.
- Membeli barang itu dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

4) Pasal 380 Ayat 1

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau didalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan orang lain.
- Sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

5) Pasal 380 (ayat 2)

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.

- Memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau didalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan orang lain.
- Sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.
- Buah hasil itu kepunyaan terpidana.

b) Hukuman

Hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan barang dirampas.

6) Pasal 381

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Berhubungan dengan asuransi.
- Menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

7) Pasal 382

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Berhubungan dengan asuransi.
- Merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.

8) Pasal 382 bis

a) Perbuatan :

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang.
- Menimbulkan kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain karena persaingan curang.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

9) Pasal 383

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah disetujui oleh pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

10) Pasal 383 bis

a) Perbuatan :

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Pemegang kognosemen.
- Sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan untuk beberapa orang penerima.

b) Hukuman :

Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

11) Pasal 384

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Pemegang kognosemen.
- Sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan untuk beberapa orang penerima.

- Harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

12) Pasal 385

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menjual, menukar atau membebani dengan *credit verband* hak tanah Indonesia, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- Menjual, menukar atau membebani dengan *credit verband* hak tanah Indonesia, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.

- Menjual, menukar atau membebani dengan *credit verband* hak tanah Indonesia, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
- Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
- Menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal tidak diberitahukan kepada yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.
- Menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, atau gedung, atau bangunan, atau penanaman atau pembenihan diatas

- tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

13) Pasal 386 ayat 1

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat.
- Diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

14) Pasal 386 Ayat 2

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat.
- Diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan.
- Nilainya atau faedahnya menjadi kurang, karena sudah dicampuri dengan bahan-bahan lain.

b) Hukuman

Hukuman penjara 5 tahun 4 bulan.

15) Pasal 287 Ayat 1

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan.

- Pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

16) Pasal 387 Ayat 2

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan.
- Pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
- Tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

17) Pasal 388 (ayat 1)

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

18) Pasal 388 (ayat 2)

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan

curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.

- Tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

19) Pasal 389

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

20) Pasal 390

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat berharga menjadi turun atau naik.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

21) Pasal 391

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menerima kewajiban untuk, atau memberikan pertolongan pada penempatan surat utang sesuatu negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau

perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

22) Pasal 392

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi.
- Dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

23) Pasal 393 (ayat 1)

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi atau menyimpan dalam penyediaan untuk dijual atau untuk dibagikan barang-barang dengan diketahui atau patut disangkanya, bahwa pada barang-barang itu telah dipasang nama atau nama firma orang lain walaupun dengan perubahan sedikit.

b) Hukuman

Hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu.

24) Pasal 393 (ayat 2)

a) Perbuatan :

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi atau menyimpan dalam penyediaan untuk dijual atau untuk dibagikan barang-barang dengan diketahui atau patut disangkanya, bahwa pada barang-barang itu telah

dipasang nama atau nama firma orang lain walaupun dengan perubahan sedikit.

- Melakukan kejahatan itu belum lewat 5 tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga.

b) Hukuman :

Hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan.

25) Pasal 393 bis (ayat 1)

a) Perbuatan :

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Seorang pengacara.
- Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh memasukkan kedalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau patut diduga bertentangan dengan yang sebenarnya.

b) Hukuman :

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.

26) Pasal 393 bis (ayat 2)

a) Perbuatan :

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- Suami/isteri atau pemiutang.
- Dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang yang diketahui atau patut diduga bertentangan dengan yang sebenarnya kepada pengacara.

b) Hukuman :

Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.

27) Pasal 394

a) Perbuatan

- Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.

- Penipuan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin.

b) Hukuman

Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

D. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Sementara menurut Moeljatno¹⁵ berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau:

¹⁵ Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hal 55.

- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.
- d. Penyertaan (*Deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alldenader*.

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP

- 1) *Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:*

- a) *Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- b) *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
- 2) *Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*)

Menurut Adami Chazawi *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk (2012:60) pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.

Adapun menurut Zainal Abidin (2006:178) pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Kanter dan Sianturi (2002:342), penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya atau dipaksa.

Sementara menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* (Amir Ilyas dan Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah:

1. Menurut Mvt:

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

2. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" itu ada tiga kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari

a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;

b. Caranya, ialah:

- ☐ Dengan memberikan sesuatu;
- ☐ Dengan menjanjikan sesuatu;
- ☐ Dengan menyalahgunakan martabat;
- ☐ Dengan kekerasan;
- ☐ Dengan ancaman;
- ☐ Dengan penyertaan;
- ☐ Dengan member kesempatan;
- ☐ Dengan memberikan saran;
- ☐ Dengan memberikan kekurangan;

- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
 - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
- d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh

pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).

e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja.

memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut *MVT*, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Zainal Abidin, 2006:224)

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya”

Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005:83), yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.

Simons (Laden Marpaung, 2005:83), menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk

mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat ,mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat” Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selamanya 15 tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.

E. Anak

1.) PENGERTIAN ANAK

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak¹⁶.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber

16 Abdussalam, *Opcit* 99.

daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

- Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu
- Masa Bayi : dua minggu-satu tahun

- Masa anak : masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun
- Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
- Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun
- Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun
- Masa tua : 60 tahun-meninggal .

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut, Unsur internal pada diri anak. Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan huku. Persamaan hak dan kewajiban anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang

dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan Hak-hak yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan .

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Pengertian Anak dari Aspek Agama. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan

melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Pengertian Dari aspek Ekonomi. Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak

dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian Dari Aspek Sosiologis Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senang-takut berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat

tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun¹⁷.

17 UU No.3 tahun 1997 pasal 1 ayat (2) tentang Peradilan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Maros Kelas 1B.

2. Sampel

Adapun responden yang dipilih adalah 1 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Maros sebanyak 1 orang

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam :

- a) Data primer, berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi yang penulis angkat.
- b) Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang telah ada yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari :

- a. Sumber data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan di bahas oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Analisis Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan normatif, melalui logika berfikir formal dan argumentatif dalam proses penyimpulan deduktif induktif serta melihat hubungan antar fenomena mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 164/Pid. Sus/2013/

PN. Mrs.

Dalam hasil wawancara langsung kepada hakim pengadilan anak di Pengadilan Negeri Maros, bahwa kasus penipuan yang dilakukan oleh anak yang selaku pelaku tindak pidana, keluarga pelaku telah melakukan musyawarah kepada korban yang telah dirugikan maka hakim pengadilan memutuskan untuk 2 bulan penjara berdasarkan penuntutan jaksa memberikan selama 3 bulan, maka ketua hakim yang mengadili perkara tetap dengan putusannya selama 2 bulan penjara dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur dan barang bukti yang diambil oleh pelaku telah kembali dengan utuh kepada pemilik korban.

Selain itu pelaku sebenarnya bisa saja mendapat berupa tindakan dari putusan hakim, akan tetapi ketua hakim memikirkan kembali bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama oleh ayahnya yang di split kan oleh ketua pengadilan, selain itu anak tersebut juga sudah pernah melakukan tindak kejahatan kriminal dalam hal " ungkapan hakim".

B. Hambatan Dalam Penjatuhan Pidana

Mengenai hambatan dalam penjatuhan sanksi hakim sama sekali tidak ada dikarenakan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sangat akurat berdasarkan hasil laporan oleh korban.

- **Unsur-Unsur Penipuan**

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsure pokok, yakni :

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. SoenartoSoerodibroto, 1992 : 241).

Ada pun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

□ Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

□ Tipu Muslihat,yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

□ Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia

berada dalam suatu keadaan tertentu, yang manakeadaanitu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

□ Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (SoenartoSoerodibrooto, 1992 : 245), bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kau sal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad

dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923

(Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab - sebab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakanya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat .Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.

b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang hakim dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. Adalah riwayat hidup pelaku kesalahan dalam bentuk pencurian secara bersama-sama dan melakukan penipuan, maka hakim menetapkan lamanya terdakwa di Rumah Tahanan Negara dengan penjara selama 2 (dua) bulan. Dengan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menimbang/mengadili, dan di dalam peradilan anak, dimana peradilan anak diselenggarakan dengan di*Split* kan oleh anak dan ayahnya yang keduanya sebagai pelaku.

Putusan hakim dalam kasus tersebut, akan memberikan pengaruh kepada ayah dan anaknya dalam hal ini anak yang berperan penting untuk generasi kedepannya, guna hakim memberikan masa kurungan tersebut agar anak sebagai pelaku mendapat efek jera di karena kan sebelumnya anak tersebut sudah pernah melakukan tindak kriminal dan dalam hal ini hakim memvonis anak sebagai pelaku telah

sesuai dengan dasar pemikiran hakim yang di miliki pada saat persidangan berlangsung.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa ini merupakan delik aduan dalam hal penipuan yang di lakukan secara bersama-sama maka sanksi yang diberikan seharusnya berupa tindakan diversi, akan tetapi melihat kasus-kasus sebelumnya pelaku telah melakukan kejahatan yang sama maka di harapkan pemberian efek jeranya harus lebih optimal.
2. Orangtua hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu kemungkinan yang dilakukan oleh anak dalam hal tindakan kriminal.
3. Pihak-pihak sebagai pelaku usaha harus lebih memperketat keamanan di tempat usaha mereka, guna tidak memberi peluang atau kesempatan kepada setiap orang khususnya anak dalam hal ini untuk melakukan tindakan criminal.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, 2006, Jakarta.

Ahmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Volume I, Kencana, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1991, Jakarta.

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Deliquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT.Aditya Bakti, 1997, Bandung.

Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000, hal.184

Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, 2007, Jakarta.

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.3 tahun 1997 pasal 1 ayat (2) tentang Peradilan Anak.

Sumber Lain:

www.wikipedia.com

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>



PENGADILAN NEGERI KLAS IB. MAROS

Jalan DR.Ratulangi No.36 Kode Pos 90511

Telepon : 371317 FAX (0411) 371318

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.22.U4/ 87 /HK/I/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : N A S R U N. AR, SH
N I P : 195703261981031004
Pangkat Gol. Ruang : Pembina (IV/A)
J a b a t a n : Panitera / Sekretaris

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : MOAMMAR ARAFAT SAHIBO
No. Pokok : B111 11 156
Fakultas : Hukum Universitas HASANUDDIN
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Program : Strata Satu (S1)

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara, di Pengadilan Negeri Klas IB Maros, dengan Judul" Putusan Hakim pada tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh anak secara bersama - sama (Studi kasus Putusan No. 164/Pid.Sus/2013/PN. MRS "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 14 Januari 2015
Panitera / Sekretaris



N A S R U N. AR, SH
Nip.195703261981031004